



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2016**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Ilahi Robbi, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2016 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**.

Disamping itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan ini, dilakukan berbagai penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta system ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Materi Laporan antara lain menguraikan tentang program dan kegiatan yang diselenggarakan serta sasaran yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan, juga dimuat inventarisasi kendala dan permasalahan yang dihadapi serta alternatif penyelesaian masalah berikut tindak lanjut yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2015 berarti Sekretariat DPRD Kota Balikpapan telah menyelesaikan kegiatannya dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2011-2016 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2015, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan untuk tahun 2016 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2016. Sebagai bentuk pertanggung jawaban pada prinsipnya transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* kami.

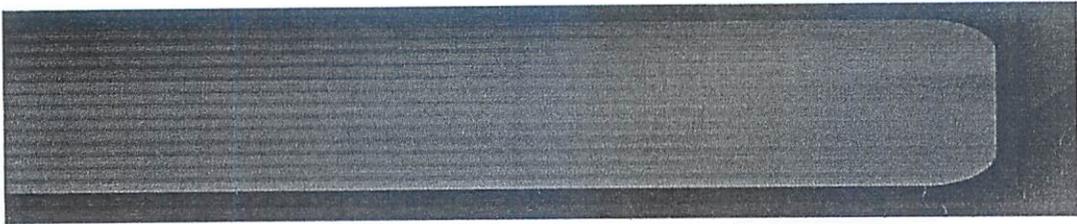
Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Balikpapan, Februari 2017
Plt. Sekretaris DPRD Kota Balikpapan

Drs. SUKARYANTO.MH

Pembina TK.I

NIP. 19640913 198903 1 008



IKHTISAR EKSEKUTIF

Kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2016 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian kinerja dari Sekretariat DPRD Kota Balikpapan selama Tahun 2016 yang merupakan amanah yang diemban oleh organisasi. Selain itu LKjIP juga merupakan suatu kebutuhan dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Tahun 2016 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang peningkatan kapasitas lembaga DPRD, tentunya bukan hanya menggambarkan keberhasilan seluruh lembaga pemerintahan, dukungan dunia usaha serta partisipasi masyarakat secara umum. Mewujudkan aparatur Negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih merupakan tujuan utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Namun demikian, selain beberapa keberhasilan diatas Sekretariat DPRD Kota Balikpapan juga mencatat adanya beberapa ketidakberhasilan dalam mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih. Beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan birokrasi menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Balikpapan belum sepenuhnya berhasil. Hal ini tetap akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang sehingga kinerja yang dihasilkan dapat lebih memberi manfaat kepada masyarakat maupun berbagai pihak yang berkepentingan dengan organisasi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Ikhtisar Eksekutif	3
Daftar Isi	4
Daftar Lampiran	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD.....	6
1.2. Tugas dan Fungsi SKPD	6
1.3. Isu Strategis Yang Dihadapi	7
1.4. Sistematika	7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.Rencana Strategis SKPD.....	9
2.2.Indikator Kinerja Utama Hasil Review	11
2.3. Perjanjian Kinerja Hasil Review	12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.Capaian Indikator Kinerja Utama	16
3.3.Realisasi Anggaran.....	21
3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis	
Capaian Kinerja	22

Bab IV PENUTUP	24
----------------------	----

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Rencana Kerja Tahunan
- 3) Pengukuran Kinerja
- 4) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan sebagai implementasi PERPPU Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pimpinan tertinggi dilembaga Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dijabat seorang Sekretaris yang mengemban tugas dan fungsi manajerial, sedangkan tugas teknis dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Keuangan sebagai supervisor dan dibawah Kepala Bagian masih ada Kepala Sub Bagian (Kasubag).

1.2. TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 97 Tahun 2008_tentang Pembentukan dan susunan organisasi, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Sekretaris DPRD Kota Balikpapan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

DPRD. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- c. Penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD;
- d. Penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan

- e. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagaimana tabel tentang Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan berikut ini.

1.3. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut :

- a. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
- b. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
- c. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
- d. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan.
- e. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

1.4. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instans Pemerintahan (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2016 terdiri dari 4 (empat) bab.

BAB IPENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum Sekretariat DPRD
- 1.2. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
- 1.3. Isu Strategis Yang Dihadapi
- 1.4. Sistematika

BAB IIPERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis SKPD
- 2.3. Indikator Kinerja Utama Hasil Review
- 2.4. Perjanjian Kinerja Hasil Review

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

3.2. Realisasi Keuangan

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bab IV PENUTUP

TABEL

JUMLAH SUMBER DAYA APARATUR SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Tahun 2016

JABATAN	NON PNS	GOL.				PENDIDIKAN							
		IV	III	II	I	S2	S1	D4	D3	D1	SMA	SMP	SD
SEKWAN		1				1							
KABAG		3				2	1						
KASUBBAG			9				8				1		
STAF			4	13	5		3		3		11	3	2
NABAN	33												
JUMLAH	35	4	13	13	5	3	12		3		12	3	2

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 . RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KOTA BALIKPAPAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

a. VISI

Visi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan pun memiliki roh yang sama dengan visi Kota Balikpapan tersebut dimana Sekretariat DPRD ingin unggul tentunya dalam kapasitas sebagai SKPD *SUPPORTING* terhadap pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan. Oleh karena itu Visi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA DAN PROFESIONAL
DALAM MEMBANTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
MELAKSANAKAN TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG SEBAGAI UNSUR
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH “**

Dari pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci yang mengandung makna:

1. Pelayanan Prima dan Profesional adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi.
2. Membantu DPRD adalah memfasilitasi seluruh kegiatan yang diselenggarakan DPRD Kota Balikpapan dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pimpinan dan anggota DPRD.
3. Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD adalah sesuatu yang diemban dan dimiliki oleh pimpinan dan anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

b. MISI

Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.

Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut diatas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah:

1. Menyelenggarakan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan persidangan DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD
2. Menyusun dan mengatur jadwal kegiatan pimpinan dan anggota DPRD untuk mendukung peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
3. Memfasilitasi sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.
4. Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan untuk mendukung peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD.

Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan prima dan professional bagi DPRD Kota Balikpapan sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif maka dibutuhkan Grand Strategi yaitu seluruh kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislative dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan pembahasan dan rapat-rapat yang telah menjadi agenda legislative dan eksekutif difasilitasi penyelenggaraannya. Seluruh jadwal kegiatan DPRD juga difasilitasi penyusunannya sehingga lebih tertib dan teratur. Sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan anggota DPRD dalam kerangka pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan di fasilitasi penyediaannya. Juga administrasi keuangandan kinerja Sekretariat DPRD dilakukan secara tertib dan akuntabel. Pengelolaan administrasi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan termasuk didalamnya kinerja diselenggarakan mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku.

c. TUJUAN

Penetapan tujuan dan sasaran organisasi hendaknya memperhatikan atau didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Selain itu, karena tujuan dimaksudkan untuk mempertajam focus pelaksanaan misi organisasi, maka tujuan organisasi harus dapat menunjukkan kerangka prioritas

dalam memfokuskan arah semua sasaran, program , dan aktifitas pelaksanaan misi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai rencana.

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kinerja Pelayanan tugas dan fungsi DPRD Kota Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 2. Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu 3. Persentase fasilitasi keluhan /pengaduan masyarakat 4. Persentase temuan BPK /Inspektorat yang ditindaklanjuti.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja ,Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi
1	Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	$\frac{\text{Rapat yang terlaksana}}{\text{Jml Rapat yg terjadwalkan}} \times 100\%$
2	Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat	$\frac{\text{Jmh aspirasi yg ditindaklanjuti kpd Dewan}}{\text{Jmh aspirasi yang masuk}} \times 100\%$

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	3.775.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air,listrik	496.656.000	
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	47.250.000	
4	Penyediaan alat tulis kantor	205.475.000	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	408.457.500	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72.678.000	
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	302.701.400	
8	Makanan dan Minuman	10.240.180.000	
9	Rapat rapat koordinasi konsultasi ke dalam dan keluar daerah	13.900.873.000	
10	Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantoran	623.400.000	
11	Pengadaan peralatan Rumah jabatan	428.100.000	
12	Pengadaan peralatan gedung kantor	576.600.000	
13	Pengadaan Meubelair	200.500.000	
14	Pemeliharaan rutin Berkala Rumah Jabatan	1.035.387.000	
15	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1.306.490.500	
16	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional	848.590.000	
17	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	170.900.000	
18	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	18.800.000	
19	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan Dewan	410.640.000	
20	Reses	5.500.325.000	
21	Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD	1.405.912.000	
22	Rapat Kerja	178.334.000	
23	Peningkatan kompetensi Banmus	330.803.975	
24	Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Bpn	1.728.500.000	

25	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Anggaran	828.846.000	
26	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	520.440.000	
27	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan	320.750.000	
28	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah	2.534.690.000	
29	Update Website DPRD dan Pemeliharaan Jaringan DPRD Kota Balikpapan	20.910.000	
30	Menyusun RisalahRapat persidangan pertemuan peninjauan dan kegiatan diluar jam dinas	38.540.500	
31	Dokumentasi dan pengolahan Data pada sekret.DPRD Kota Balikpapan	29.992.000	
32	Penyediaan Jasa Kesehatan Anggota DPRD	193.290.000	
33	Penyediaan Fasilitas DPRD Kota Balikpapan	1.200.100.000	
	Total	40.279.173.041	

2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja aparatur sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administrative , tetapi diharapkan dapat mengarah pada manarejial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun sebelumnya . Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup otcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya , sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan dibuatnya perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, kinerja aparatur
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasai kinerja aparatur
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evalasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja pimpinan SKPD.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs.SUKARYANTO.MH

Jabatan : Plt.SEKRETARIS DPRD KOTA BALIKPAPAN

Selanjutnya disebut pihak pertama :

Nama : H.M.RIZAL EFFENDI.SH

Jabatan : WALIKOTA BALIKPAPAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Balikpapan Januari 2016

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H.M.RIZAL EFFENDI

Drs.SUKARYANTO,MH

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2016 yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan tahun 2016. Dalam bab ini juga akan disajikan akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran 2016.

Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan sesuai sasaran indikator kinerja yang pertama ditargetkan sebesar 80%, adapun kriteria dari pemenuhan sarana dan prasarana dapat dilihat dalam lampiran laporan ini. Untuk sarana dan prasarana Pimpinan dan anggota DPRD diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pasal 17 ayat (1) yang berbunyi "Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, sedangkan untuk anggota DPRD diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi "Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta kelengkapannya.

Untuk fasilitas sarana dan prasarana lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam pasal 25 ayat (3), bahwa setiap pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan fasilitas yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja perjalanan dinas
- d. Belanja Pemeliharaan
- e. Belanja modal

Belanja pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas

di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Belanja barang dan jasa, yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti ATK, pakaian dinas, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya.

Belanja perjalanan dinas, diklasifikasikan menjadi dua jenis dalam istilah perbendaharaan Negara, yaitu perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Komponen biaya perjalanan dinas terdiri dari, uang harian, biaya transport, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam kota.

Belanja pemeliharaan, antara lain sarana dan prasarana gedung kantor dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD dan kendaraan dinas pimpinan DPRD.

Belanja modal, antara lain untuk kebutuhan pembangunan/pelebaran/penambahan gedung kantor/rumah jabatan/rumah dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan DPRD dan/ atau rumah dinas DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas DPRD yang sifatnya menambah kekayaan daerah. Jenis dan besaran cc nya untuk Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006, adapun besaran jumlah tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan diatur dalam **Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-730/2014** tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan Periode 2014-2019.

Kondisi saat ini fasilitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan yang berkenaan dengan kendaraan roda 4 adalah sebagaimana tabel berikut ini ;

Tabel 3.1

Kendaraan roda

Kendaraan Jabatan dan operasional Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

NO	NAMA AKD	JUMLAH KENDARAAN	JENIS KENDARAAN	KET
1	2	3	4	5
1	Pimpinan	4	Mini bus	Jabatan
2	Komisi	4	Mini bus	Operasional
3	Bapeperda	1	Mini bus	Operasional
4	Badan Kehormatan	1	Mini bus	Operasional
5	Fraksi	6	Mini bus	Operasional
6	Anggota	7	Mini bus	Operasional
7	Sekretariat DPRD	7	Mini bus	Operasional
8	Rumah dinas ketua	2	Mini bus/ bus	operasional
	JUMLAH	32		

Tabel 3.2

Rumah Jabatan

NO	RUMAH		Jumlah	Keterangan
	Pimpinan	Anggota		
1	2	3	4	5
1	1	-	1	1. Rumah Jabatan Pimpinan hanya Ketua DPRD

Dengan telah menempati bangunan baru sejak tanggal 15 Juli 2015, Alat Kelengkapan Dewan (AKD), anggota DPRD Kota Balikpapan dan Fraksi-Fraksi telah difasilitasi ruang kerja masing-masing disamping itu juga telah disediakan ruang-ruang rapat, sehingga bisa menyelenggarakan rapat-rapat tidak diluar gedung/ruang sendiri. Jumlah ruang kerja dan ruang rapat sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Ruang Kerja, Ruang Rapat, Ruang Tamu, Ruang Tunggu dan Kamar Mandi/WC

No	Nama	Jumlah Ruang					Keterangan
		Rapat	Kerja	Tamu	Tunggu	Mandi/WC	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pimpinan	-	4	4	4	4	Ruang Rapat dan Ruang Kerja dilengkapi dengan prasarana a.l -Komputer -Meja dan kursi rapat dan computer -Lemari Buku/arsip -Filling cabinet -Buffet -Telepon -Infokus -Whiteboard -AC
2	Anggota	-	-	-	-	-	
3	Komisi	-	4	-	-	-	
4	Badan Musyawarah	-	1	-	-	-	
5	Badan Kehormatan	-	1	-	-	-	
6	Fraksi	-	7	-	-	-	
7	Ruang Rapat DPRD	3	-	-	-	4	
8	Ruang Sekret.DPRD	-	7	-	-		

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

A. Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan DPRD

Karena pemenuhan sarana dan prasarana antara perencanaan dengan realisasi pelaksanaan ada perbedaan kebutuhan mengingat dalam perjalanannya ada perubahan dari rencana awal tetapi pada prinsipnya tidak menjadikan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagaimana grafik berikut ini:

PENYERAPAN ANGGARAN PER KEGIATAN

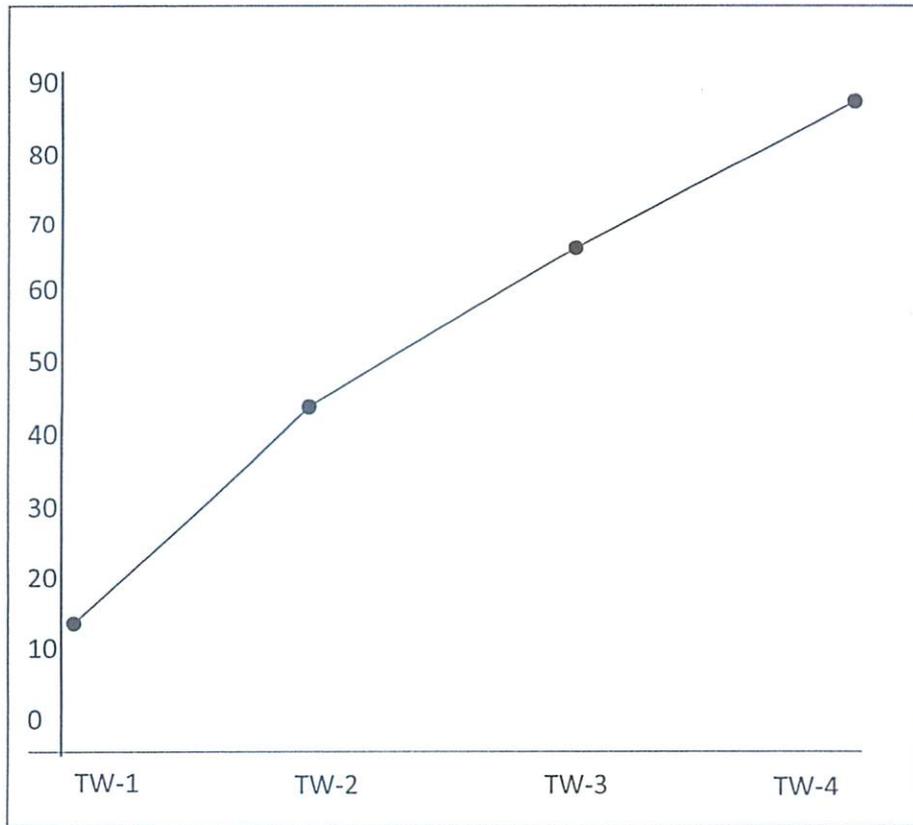
Tahun 2016

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase realisasi anggaran
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	3.775.000	-	0%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air,listrik	496.656.000	418.623.572	84.29%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	47.250.000	16.243.000	34.38%
4	Penyediaan alat tulis kantor	205.475.000	202.962.333	98.78%
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	408.457.500	406.810.199	99.60%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72.678.000	72.669.626	99.99%
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang undangan	302.701.400	167.204.000	55.24%
8	Makanan dan Minuman	10.240.180.000	9.683.466.585	94.56%
9	Rapat rapat koordinasi konsultasi ke dalam dan keluar daerah	13.900.873.000	12.203.025.530,04	87.79%
10	Penyediaan Jasa administrasi teknis perkantoran	623.400.000	570.510.000	91.52%
11	Pengadaan peralatan Rumah jabatan	428.100.000	414.392.000	96.80%
12	Pengadaan peralatan gedung kantor	576.600.000	556.968.440	96.60%
13	Pengadaan Meubelair	200.500.000	197.510.000	98.51%
14	Pemeliharaan rutin Berkala Rumah Jabatan	1.035.387.000	913.953.497	88.27%
15	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	1.306.490.500	1.225.710.717	93.82%
16	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	848.590.000	841.232.665	99.13%
17	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	170.900.000	156.475.000	91.56%
18	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan	18.800.000	-	0%
19	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapan Dewan	410.640.000	403.532.000	98.27%
20	Reses	5.500.325.000	3.478.462.946,77	63.24%

21	Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD	1.405.912.000	1.036.462.600	73.75%
22	Rapat Kerja	178.334.000	158.985.550	89.15%
23	Peningkatan kompetensi Banmus	330.803.975	250.781.150	75.81%
24	Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Bpn	1.728.500.000	1.117.209.810	64.63%
25	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Anggaran	828.846.000	445.061.333	53.70%
26	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD	520.440.000	463.065.000	88.98%
27	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan	320.750.000	222.486.900	69.36%
28	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah	2.534.690.000	2.177.145.594	85.89%
29	Update Website DPRD dan Pemeliharaan Jaringan DPRD Kota Balikpapan	20.910.000	10.296.800	49.24%
30	Menyusun RisalahRapat persidangan pertemuan peninjauan dan kegiatan diluar jam dinas	38.540.500	6.618.800	17.17%
31	Dokumentasi dan pengolahan Data pada sekret.DPRD Kota Balikpapan	29.992.000	26.254.500	87.54%
32	Penyediaan Jasa Kesehatan Anggota DPRD	193.290.000	115.476.825	42.93%
33	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Bpn	1.200.100.000	872.030.010	72.66%
	Total	40.279.173.041	38.831.626.982.81	84.18%

Grafik 3.1

Penyerapan Anggaran Sarana dan Prasarana



Olehnya di Indikator Penyerapan Anggaran Sarana dan Prasarana kami mendapat capaian lebih 100 persen, dikarenakan realisasi kami lebih besar dari target tahunan.

Untuk Indikator Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu kami telah menargetkan 100% dengan realisasi 100%. Hal ini karena kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan dan memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut mengingat bahwa kegiatan-kegiatan termaksud sudah bisa diprediksi dalam satu anggaran.

Tabel 3.4
Persentase kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	1. Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana	%	80	82,76	103,45
		2. Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu	%	100	100	100,00

B. Fasilitasi Keluhan Pengaduan Masyarakat

Pada indikator Kinerja Persentase fasilitasi keluhan /pengaduan masyarakat kami telah menargetkannya 100%, dengan asumsi bahwa semua aspirasi akan tersampaikan kepada Dewan untuk dibahas lebih lanjut. Berangkat dari hal tersebut kami mendapat realisasi 100% dengan capaian juga 100%.

Tabel 3.5
Persentase Fasilitasi Keluhan/ Pengaduan Masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan aspirasi masyarakat kepada dewan	Persentase fasilitasi keluhan/ pengaduan masyarakat	%	100	100	100,00

Pengukurannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti kepada Dewan}}{\text{Jumlah aspirasi yang masuk}} \times 100\%$$

C. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD

Untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD terdapat 2(dua) Indikator Kinerja. Untuk indikator kinerja yang pertama yaitu Nilai Hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan mengingat kami belum mengetahui standar penilaian yang ditetapkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai SKPD pelaksana penilaian. Namun demikian target pada tahun 2016 ini ternyata dapat terlampaui, namun hal ini belum dapat kami jadikan standar mengingat indikator standar penilaian belum kami ketahui sehingga kami belum menargetkan.

Pada Indikator Kinerja Sasaran 2, yaitu persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti, kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua temuan atau koreksi yang dilakukan oleh instansi pemeriksa (BPK RI/ Inspektorat Kota Balikpapan) telah kami tindak lanjuti untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2016 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

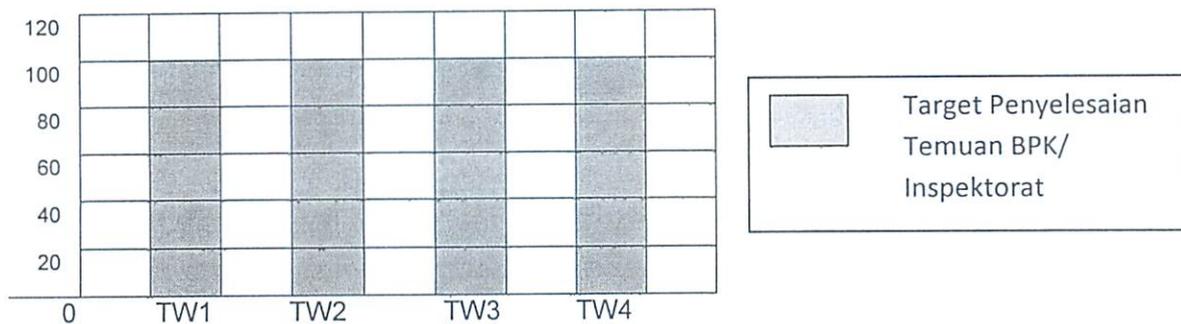
LKjIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2016 Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi baik. Dalam Tahun Anggaran 2016 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 46.128.886.875,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.38.831.626.982,81,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 84.18 % dengan demikian dapat dikatakan tahun 2016

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan kondisi anggaran adalah silpa Rp. 7.297.259.892,19,-

Grafik 3.3
Penyelesaian Temuan BPK RI/Inspektorat Kota Balikpapan



3.2. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2016 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan DPA Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dengan total nilai Rp. 46.128.886.875,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 84.18 % dengan demikian dapat dikatakan tahun 2016 kondisi anggaran adalah Silpa Rp.7.297.259.892,19,-. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien disamping perubahan kegiatan dewan yang menyebabkan tidak optimalnya penyerapan anggaran.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan pada tahun 2016 dapat dilihat pada sebagai berikut :

- 1 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 2 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 3 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- 4 Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 6 Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap

indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

A. Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Kinerja

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan mempunyai tiga (3) sasaran yang akan dicapai, yaitu :

- a Meningkatkan kualitas produk tugas-tugas fasilitasi rapat-rapat DPRD.*
- b Meningkatkan wawasan dan aktivitas anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedewanan.*
- c Meningkatkan sistem informasi dan publikasi kedewanan.*

Dari sasaran program dan kegiatan di atas, dapat dijelaskan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1: *Meningkatnya kualitas produk tugas-tugas fasilitasi rapat-rapat DPRD.*

Sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas fasilitasi DPRD.

Sasaran ini terbagi empat kegiatan, yaitu :

1. Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota DPRD.
2. Fasilitasi Pengkajian Peraturan Daerah
3. Fasilitasi Rapat Internal Komisi
4. Sosialisasi Peraturan Daerah Inisiatif.

Sasaran 2 : *Meningkatnya wawasan dan aktivitas anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedewanan.*

Sasaran 3 : *Meningkatnya sistem informasi dan publikasi kedewanan*

B. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (input) dan keluaran (output). Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Memperhatikan tupoksi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 1 seperti tersebut diatas. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2016 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2016 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Sekretariat DPRD Kota Balikpapan Tahun 2016 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2016 Sekretariat DPRD Kota Balikpapan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (delapan) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi baik Dalam Tahun Anggaran 2016 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Balikpapan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 46.128.886.875,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 38.831.626.982,81 atau dengan serapan dana APBD mencapai 84.18%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2016 Sekretariat DPRD Kota Balikpapan kondisi anggaran adalah silpa Rp. 7.297.259.892,19,-

Renstra Sekretariat DPRD Kota Balikpapan 2011-2016 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, secara efektif telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat DPRD Kota Balikpapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat DPRD Kota Balikpapan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Balikpapan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Kota Balikpapan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Balikpapan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Balikpapan.

Balikpapan, Februari 2017
Plt. Sekretaris DPRD Kota Balikpapan

Drs. SUKARYANTO, MH
Pembina TK.I
NIP. 19640913198903 1 008

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

TINGKAT UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Tahun 2016

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Kantor DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	100%
Kantor dan Rumah Jabatan Kantor DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya aktifitas kantor melalui telepon, air, dan listrik pada rumah jabatan dan kantor	100%
Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor DPRD Kota Balikpapan	Tercapainya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	100%
Kantor DPRD Kota Balikpapan	Tercapainya penyediaan alat tulis kantor	100%
Kantor DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya penyediaan barang dan cetakan	100%
Kantor dan Rumah Jabatan DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya aktifitas kegiatan perkantoran	100%
Kantor DPRD Kota Balikpapan	Tersedianya bahan bacaan	100%
Anggota DPRD, Instansi Terkait dan Tamu	Terlaksananya tamu pada rapat-rapat	100%
PNS Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	100%
Naban dan THL Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	100%
Anggota DPRD Kota Balikpapan	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	100%
Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Balikpapan	Tercapainya pengadaan peralatan pada rumah jabatan Ketua DPRD	100%
Pengadaan Pada Gedung Kantor	Tersedianya barang untuk perlengkapan gedung kantor	100%
Kantor DPRD Kota Balikpapan	Tersedianya meubelair	100%
Rumah Jabatan Ketua DPRD Kota Balikpapan	Tersedianya pemeliharaan aset pada rumah jabatan Ketua DPRD Kota Balikpapan	100%
Gedung Kantor DPRD Kota Balikpapan	Tercapainya pemeliharaan gedung dan aset pada gedung kantor DPRD Kota Balikpapan	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Kendaraan Dinas/ Operasional Kantor DPRD Kota Balikpapan	Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	100%
Gedung Kantor DPRD Kota Balikpapan	Tercapainya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	100%
Sekretariat DPRD Kota Balikpapan	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	100%
Anggota DPRD Kota Balikpapan	Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya	100%
Masyarakat dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya kegiatan reses pada masyarakat Kota Balikpapan	100%
Anggota DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan Anggota DPRD	100%
Anggota DPRD Kota Balikpapan	Konsultasi dan laporan terkait permasalahan yang terjadi di Kota Balikpapan	100%
Anggota DPRD Seluruh Indonesia	Tercapainya pembahasan rapat kerja DPRD Kota Balikpapan	100%
Agenda DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya peningkatan SDM Badan Musyawarah DPRD Kota Balikpapan	100%
SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Masyarakat Kota Balikpapan	Tersusunnya rekomendasi dan laporan yang disusun/ ditetapkan oleh pansus/ panja DPRD Kota Balikpapan	100%
APBD Kota Balikpapan	Terlaksananya pembahasan dan penyusunan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang berdaya guna dan tepat sasaran	100%
Agenda DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya Bimtek Anggota DPRD Kota Balikpapan	100%
Anggota DPRD, Partai Politik, dan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan	Terlaksananya sosialisasi tata tertib dan kode etik DPRD Kota Balikpapan dan Meningkatnya koordinasi dan informasi dalam tugas dan fungsi BK DPRD Kota Balikpapan	100%
SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Masyarakat Kota Balikpapan	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah dan terlaksananya sosialisasi	100%
Kantor DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya Penyediaan Jaringan Website	100%

--	--	--

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Anggota DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya publikasi kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan	100%
Anggota DPRD Kota Balikpapan	Terlaksananya MCU dan termonitornya kesehatan Anggota DPRD Kota Balikpapan	100%
SKPD terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan Masyarakat Kota Balikpapan	Terselesaikannya penyusunan risalah rapat persidangan, pertemuan, peninjauan dan kegiatan lain	100%
Kantor DPRD Kota Balikpapan	Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD Kota Balikpapan	100%

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

Sekretariat DPRD Kota Balikpapan

Tahun 2016

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran</i>	100%	0	0
<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik</i>	<i>Terlaksananya aktifitas kantor melalui telepon, air dan listrik pada rumah jabatan dan kantor</i>	100%	84.29%	84.29%
<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Tercapainya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	100%	34.38%	34.38%
<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>	<i>Tercapainya penyediaan alat tulis kantor</i>	100%	98.78%	98.78%
<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Terlaksananya penyediaan barang dan cetakan</i>	100%	99.60%	99.60%
<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	<i>Terlaksananya aktifitas kegiatan perkantoran</i>	100%	99.99%	99.99%
<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	<i>Tersedianya bahan bacaan</i>	100%	55.24%	55.24%
<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>	<i>Terlaksanay tamu pada rapat-rapat</i>	100%	94.56%	94.56%
<i>Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah</i>	<i>Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah</i>	100%	87.79%	87.79%
<i>Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran</i>	<i>Tersedianya jasa administarsi perkantoran</i>	100%	91.52%	91.52%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
<i>Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Tersedianya kendaraan dinas/operasional</i>	100%		
<i>Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas</i>	<i>Tercapainya pengadaan peralatan pada rumah jabatan DPRD</i>	100%	96.80%	96.80%
<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>	<i>Tersedianya barang untuk perlengkapan gedung kantor</i>	100%	96.60%	96.60%

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
<i>Pengadaan Meubelair</i>	<i>Tersedianya meubelair pada Kantor DPRD Kota Balikpapan</i>	100%	98.51%	98.51%
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan</i>	<i>Tersedianya pemeliharaan aset pada rumah jabatan Ketua DPRD Kota Balikpapan</i>	100%	88.27%	88.27%
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>	<i>Tercapainya pemeliharaan gedung dan aset pada gedung kantor DPRD Kota Balikpapan</i>	100%	93.82%	93.82%
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>	<i>Tercapainya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional</i>	100%	99.13%	99.13%
<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor</i>	<i>Tercapainya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor</i>	100%	91.56%	91.56%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>	<i>Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya</i>	100%	0.00	0.00
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya (Dewan)</i>	<i>Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya</i>	100%	98.27%	98.27%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah				
<i>Kegiatan Reses</i>	<i>Terlaksananya kegiatan reses pada masyarakat kota Balikpapan</i>	100%	63.24%	63.24%
<i>Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan</i>	<i>Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD</i>	100%	73.75%	73.75%
<i>Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Balikpapan</i>	<i>Konsultasi dan laporan terkait permasalahan yang terjadi di Kota Balikpapan</i>	100%	0.00	0.00
<i>Rapat Kerja</i>	<i>Tercapainya pembahasan rapat kerja DPRD Kota Balikpapan</i>	100%	89.15%	89.15%
<i>Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Musyawarah Kota Balikpapan</i>	<i>Terlaksananya peningkatan SDM Badan Musyawarah DPRD Kota Balikpapan</i>	100%	75.81%	75.81%

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<i>Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan</i>	Tersusunnya rekomendasi dan laporan yang disusun/ditetapkan oleh pansus/ panja DPRD Kota Balikpapan	100%	64.63%	64.63%
<i>Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan anggaran</i>	Terlaksananya pembahasan dan penyusunan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan yang berdaya guna dan tepat sasaran	100%	53.70%	53.70%
<i>Peningkatan Kompetensi tugas pokok dan fungsi DPRD</i>	Meningkatnya wawasan SDM DPRD Kota Balikpapan dan terlaksananya sosialisasi	100%	88.98%	88.98%
<i>Peningkatan kompetensi tugas pokok dan fungsi Badan Kehormatan</i>	Terlaksananya sosialisasi tata tertib dan kode etik DPRD Kota Balikpapan dan Meningkatnya koordinasi dan informasi dalam tugas dan fungsi BK DPRD Kota Balikpapan	100%	69.36%	69.36%
<i>Peningkatan kompetensi tugas pokok dan fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah</i>	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan daerah dan terlaksananya sosialisasi	100%	85.89%	85.89%
<i>Update website DPRD dan Pemeliharaan jaringan Kantor DPRD Kota Balikpapan</i>	Terlaksananya Penyediaan Jaringan Website	100%	49.24%	49.24%
<i>Menyusun risalah rapat persidangan pertemuan peninjauan dan kegiatan diluar jam dinas</i>	Terselesaikannya penyusunan risalah rapat persidangan, pertemuan, peninjauan dan kegiatan lain	100%	17.17%	17.17%
<i>Dokumentasi dan pengolahan data sekret. DPRD Kota Balikpapan</i>	Tersedianya dokumentasi kegiatan DPRD Kota Balikpapan	100%	87.54%	87.54%
<i>Penyediaan jasa kesehatan anggota DPRD Kota Balikpapan</i>	Terlaksananya MCU Anggota DPRD dan termonitornya Kondisi kesehatan Anggota DPRD Kota Balikpapan	100%	42.93%	42.93%

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<i>Fasilitasi Kegiatan DPRD Kota Balikpapan</i>	Terlaksana nya layanan kegiatan DPRD Kota Balikpapan	100%	72.66%	72.66%

KERTAS KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja Walikota			Perjanjian Kinerja Eselon II					Perjanjian Kinerja Eselon III					Perjanjian Kinerja Eselon IV						
No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Satuan	Target	No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	No.	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan dan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentasi Pemenuhan sarana prasarana dan Presentase Fasilitasi Rapat rapat Tepat waktu	%	86	1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Persen	100	Kabag Umum	1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	Matrai, surat	575	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
														2	penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Bukti pembayaran tagihan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	kwitansi	12	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
														3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan	unit	Roda 4 = 45 unit roda 2 = 12 unit	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
														4	Penediaan ATK	Jenis ATK	jenis	56	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
														5	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	jenis	15	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
																Jumlah lembar penggandaan	lembar	550	
																paket dokumentasi	paket dan buah	60 dan 1000	
														6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	20	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
														7	Penyediaan makanan dan minuman	Jamuan makan harian pegawai	bungkus,dos,	6838	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
																jamuan makan minum rapat	kotak,porsi	40000	
jamuan makan minum tamu	tahun	1																	
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	bahan bacaan	Eksemplar	37200	Kasubag Dokumentasi Pengolahan data dan perpustakaan														
9	Rapat rpat Koordinasi, konsultasi ke dalam dan keluar daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Paket	1	Kasubag Humas dan Protokol														
		PerjalananDinas Keluar Daerah		1															
10	Penyediaan Administrasi Perkantoran	Jasa Teknis	Jumlah Tenaga Non PNS	orang	33	Kasubag Umum dan TataUsaha													

									1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	Kabag Umum	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan	unit	1	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
															2	pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	jenis peralatan rumah jabatan	jenis	3	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
															3	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jenis peralatan gedung kantor	jenis	2	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
															4	Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan	jenis pemeliharaan	jenis	6	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
															5	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jenis Pemeliharaan	jenis	5	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
															6	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	Jumlah kendaraan roda 4	unit	45	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
														Jumlah kendaraan roda 2			12			
															7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan yang dipelihara	unit	3	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
									1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tertaksananya Pembahasan dan penyusunan anggaran sesuai kebutuhan	persen	100	Kabag Persidangan,risalah dan perundangundangan	1	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan fungsi Badan Anggaran	Dokumen Penyusunan Anggaran	Dokumen	3	Kasubag Program
										Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tertaksananya pengiriman/Pelatihan SDM DPRD Kota Balikpapan	persen	100	Kabag Persidangan, risalah dan perundangundangan	2	Peningkatan Kompetensi Terhadap Tugas dan Fungsi DPRD (Adeksi)	Wawasan SDM	org	45	Kasubag Dokumentasi Pengolahan data dan perpustakaan
										Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya Kapasitas lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	persen	100	Kabag Umum	3	Rapat Kerja	Pembahasan Rapat Kerja	paket	1	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyaluran Aspirasi Masyarakat Kepada Dewan	Presentase Penyaluran Aspirasi atau Pengaduan Masyarakat	%	80		1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tertaksananya kegiatan Reses pada Masyarakat Kota Balikpapan	persen	100	Kabag Persidangan, risalah dan perundangundangan	4	Reses	Tersampalkannya aspirasi Masyarakat kepada DPRD	Jumlah reses	2	Kasubag Dokumentasi Pengolahan data dan perpustakaan

										Terlaksananya penyusunan dan Pembuatan dan Pembuatan NA dan Draf Raperda	persen	100	Kabag Persidangan, risalah dan perundangundangan	5	Peningkatan Kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Meningkatnya Kompetensi Tugas dan Fungsi BAPERDA	Jumlah NA dan Draf Raperda	8 NA dan * 8 Raperda	Kasubag Hukum dan Perundang undangan
										Terlaksananya Sosialisasi Peraturan DPRD ttg Tata tertib ,Kode etik,dan tata beracara	persen	100	Kabag Persidangan, risalah dan perundangundangan	6	Peningkatan kompetensi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kehormatan	Meningkatnya Kompetensi Tugas dan Fungsi Badan Kehormatan	Jumlah sosialisasi	3	Kasubag Hukum dan Perundang undangan
										Tersusunnya Rekomendasi /Laporan Oleh Pansus/Panja DPRD	persen	100	Kabag Persidangan, risalah dan perundangundangan	7	Panitia Khusus/Panitia Kerja DPRD Kota Balikpapan	Rekomendasi dan laporan	Jumlah Rekomendasi dan laporan	2	Kasubag Hukum dan Perundang undangan
										Terlaksananya Konsultasi Badan Musyawarah DPRD Kota Balikpapan	persen	100	Kabag Persidangan, risalah dan perundangundangan	8	Peningkatan kompetensi Badan Musyawarah Kota Balikpapan	Terlaksananya Kegiatan BANMUS dalam Perumusan Rencana Kerja DPRD	Jumlah perjalanan	2	Kasubag Persidngan dan Risalah

Balikpapan Januari 2017
 Plt.Sekretaris DPRD Kota Balikpapan 

Drs.SUKARYANTO,MH

**KERTAS KERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2016**

Perjanjian Kinerja Walikota			Perjanjian Kinerja Eselon II					Perjanjian Kinerja Eselon III					Perjanjian Kinerja Eselon IV						
No.	Sasaran RPJMD	Indikator Kinerja	No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Satuan	Target	No.	Program	Indikator Kinerja (Outcome)	Satuan	Target	Penanggung Jawab	No.	Kegiatan	Indikator Kinerja (Output)	Satuan	Target	Penanggung Jawab
1	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Profesionalitas ASN	1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan Pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan dan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan sarana prasarana dan Presentase Fasilitasi Rapat rapat Tepat waktu	%	100	1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Tertaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	Persen	100	Kabag Umum	1	Penyediaan jasa surat menyurat	terlaksananya kegiatan administrasi perkantoran	Matrai, surat	575	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
														2	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bukti pembayaran tagihan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	kwitansi	12	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
														3	Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan	unit	Roda 4 = 45 unit roda 2 = 12 unit	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
														4	Penediaan ATK	Jenis ATK	jenis	56	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
														5	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	jenis	15	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
																Jumlah lembar penggandaan	lembar	550	
																paket dokumentasi	paket dan buah	60 dan 1000	
														6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis komponen listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	20	Kasubag rumah tangga dan perlengkapan
															jamuan makan harian pegawai	bungkus, dos,	6838		

